

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk yang besar, dan memiliki wilayah negara yang luas. Dengan demikian, mengharuskan negara untuk mampu menghadapi persoalan-persoalan, salah satunya yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti halnya sandang, pangan dan papan. Jika diartikan dengan lebih luas, kemiskinan sering pula ditandai dengan kurang terpenuhinya sarana pendidikan, layanan kesehatan yang memadai, dan sarana prasarana transportasi yang susah dijangkau oleh masyarakat secara umum.²

Dalam hal pengentasan kemiskinan, sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 27 (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.³ Menurut pasal ini menegaskan bahwa seluruh warga Negara berhak hidup layak yang lepas dari jurang kemiskinan agar bisa melanjutkan kehidupan dan bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan.

²Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hal. 143

³ Pasal 27 (2) Undang-Undang Dasar 1945

Program Pemberdayaan masyarakat didorong melalui strategi yang lebih realistis kepada target sasaran yaitu dengan diberlakukannya Inpres Desa Tertinggal (IDT) mengenai peningkatan penanggulangan kemiskinan, kemudian diikuti dengan program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (PDT), serta dipertajam dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pada Tahun Anggaran 1998/1999.⁴

Pengentasan kemiskinan merupakan fokus masalah yang dihadapi oleh pemerintah, hal ini yang membuat pemerintah mengeluarkan beberapa program dalam hal pengentasan kemiskinan. Adapun salah satu program nasional yang dicanangkan pemerintah dimana keberadaannya dirasa mampu membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi terutama pada perekonomian mikro yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM). Program tersebut merupakan salah satu dari implementasi prioritas nasional dalam penanggulangan dan pencapaian target-target MDGs. Program ini telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-5 yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.⁵

UPK PNPM-Mandiri Pedesaan bertransformasi menjadi BUM Desa Bersama melalui pengimplementasian Musyawarah antar-Desa (MAD) yang difasilitasi oleh BKAD (Badan Kerjasama Atar-Desa) untuk mengagendakan pendirian/pembentukan BUM Desa Bersama di tingkat

⁴ Ari Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Ke Depan*, (Bandung: Fokus Media, 2012), Hal. 78

⁵ Agung Laksono, *Menuju Indonesia Emas*, (Jakarta: Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat. Hal. 18

kecamatan atau kawasan pedesaan. Hasil kesepakatan dalam Musyawarah antar-Desa tentang pengalihan aset tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam penetapan BUM Desa Bersama melalui Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama. Dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) tersebut juga mengamanahkan untuk menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku untuk BUM Desa Bersama sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan BUM Desa Bersama.⁶

Dari desa, oleh desa, dan untuk desa yang sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat merupakan model pengelolaan BUMDes. Pembentukan aktivis desa dalam bentuk organisasi secara melembaga atau badan usaha yang dikelola secara terpadu serta berkemampuan. Hal ini merupakan cara kerja dalam bentuk BUMDes. Namun dalam pelaksanaannya berdasar potensi asli desa yang dijadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Untuk menjadikan perubahan kesejahteraan masyarakat desa berkelanjutan, dan BUMDes dijadikan salah satu sebagai modal dalam usaha desa. Lembaga ini juga menjadi penggerak kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut karakteristik desa.⁷

Cara kerja BUMDesma adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau

⁶ Anom Surya Putra, *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hal. 38

⁷ Abdul Rahman Suleman, dkk. *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hal. 62.

badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap berstandar pada potensi asli desa. Program yang ada di BUMDESMA merupakan pinjaman berbentuk kelompok dengan system pembayaran angsuran dengan tanggung renteng. Adapun tanggung renteng dan kelompok disini diberlakukan karena pinjaman ini merupakan pinjaman tanpa agunan atau jaminan, dengan demikian pengendalian risiko kredit bermasalah dan pengimplementasian nilai-nilai yang terkandung dalam tanggung renteng menjadi hal yang penting demi keberhasilan tujuan dari adanya program ini. Mengingat bahwa dana yang dikelola dalam hal ini adalah dana bergulir, yang mana keberhasilan penerapan system tanggung renteng ini dapat mempengaruhi kelancaran perguliran dana dari satu kelompok ke kelompok lainnya.

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Sendang Tulungagung merupakan salah satu BUMDESMA yang terdapat di Kabupaten Tulungagung. Di kabupaten Tulungagung sendiri terdapat 14 BUMDESMA yang tersebar di beberapa kecamatan.⁸ Adapun daftar BUMDESMA di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar BUMDESMA di Kabupaten Tulungagung

Kab/Kota	Nama BUMDESMA
	1. Sendang 2. Bandung 3. Gondang

⁸ Daftar Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Pengelola Kawasan Pedesaan, dalam <http://dpmd.jatimprov.go.id/katalogttg/item/bumdesma-pdf>, diakses 29 November 2019, pukul 20.09 WIB.

Kabupaten Tulungagung	<ol style="list-style-type: none"> 4. Karangrejo 5. Pucanglaban 6. Tanggunggunung 7. Tanggunggunung 8. Pakel 9. Besuki 10. Kalidawir 11. Rejotangan 12. Campurdarat 13. Ngantru 14. Sumbergempol
-----------------------	---

Sumber: dari <http://dpmd.jatimprov.go.id/katalogttg/item/bumdesma-pdf>

Sampai dengan hari ini, BUMDESMA Sendang telah mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini terbukti dari total aset yang telah mencapai milyaran rupiah dan dapat pula memberikan sumbangsih ke desa. Adapun bukti nyata perkembangan BUMDESMA ini dapat dilihat dari bertambahnya usaha perdagangan yang mulai dirancang pembangunannya sejak bulan Agustus tahun 2019.

Terdapat dua program ekonomi didalam lembaga ini. Yang pertama yaitu Usaha Ekonomi Produktif (UEP), program ini secara kemanfaatan diberikan untuk mereka yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya yang boleh diikuti baik oleh Pria maupun wanita, sedangkan program yang kedua yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP), adapun yang terdiri dari kelompok SPP ini adalah dikhususkan untuk Ibu-Ibu yang secara kemanfaatan dapat digunakan untuk kegiatan konsumtif, disamping itu memiliki tujuan untuk membangkitkan jiwa kewirausahaan atau *enterpreneurship*, khususnya para ibu rumah tangga sehingga mereka mampu meningkatkan

perekonomian keluarganya, disamping itu juga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.⁹

Terhitung sejak awal berdirinya lembaga ini pada tahun 2001 dengan nama awal PPK (Program Pengembangan Kecamatan) hingga bertransformasi menjadi BUMDESMA Sendang, jumlah total kelompok peminjam mengalami perkembangan yang cukup baik, yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Daftar Jumlah Kelompok UEP dan SPP BUMDESMA
Sendang

Desa	Jumlah Kelompok Awal		Jumlah Kelompok yang Dilayani Saat Ini	
	UEP	SPP	UEP	SPP
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
Kedoyo	-	12	1	22
Nglutung	1	10	2	9
Talang	1	6	1	5
Dono	-	12	4	15
Krosok	2	6	4	7
Tugu	1	4	7	3
Picisan	1	8	1	7
Nyawangan	-	4	3	12
Sendang	2	11	3	12
Nglurup	-	14	1	19
Geger	1	15	13	30
Total	9	102	40	141
	111		181	

Sumber: Data Diolah (Laporan per Juni 2020)

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama (eks PNPM-Mandiri) kepada masyarakat yang memenuhi kualifikasi adalah

⁹ Observasi Awal dengan Ketua UPK

pinjaman tanpa agunan. Dengan artian, bahwa nasabah yang ingin mengajukan pinjaman tidak perlu menyertakan agunan atau jaminan sebagai jaminan atas pinjamannya. Pinjaman tanpa agunan merupakan pinjaman yang didasarkan pada kepercayaan kreditor dalam mengeluarkan pinjamannya serta kepercayaannya mengenai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. memiliki risiko tinggi bagi pihak lembaga yang memberikan pinjaman.¹⁰

Menurut Nurazizah,¹¹ dalam penelitiannya mengenai Pengendalian Intern Piutang dalam Mengelola Piutang Macet dengan Studinya yang dilakukan di PNPM Mandiri Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, mengemukakan bahwa lancarnya dana yang dikucurkan oleh UPK dapat terus bergulir dari satu kelompok ke kelompok yang lain dapat terjadi dengan didukung sistem pengendalian piutangnya yang dapat diimplementasikan secara tepat. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengendalian piutang yang tepat dapat menciptakan stabilitas keuangan yang sehat.

Yang menjadi fokus utama pada lembaga pembiayaan, salah satunya yaitu terkait kelancaran pengembalian pinjaman. Kredit macet atau pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan atau kondisi pembiayaan yang tengah mengalami penyimpangan atau deviasi, atas

¹⁰Arief Sugiono, *Manajemen Keuangan untuk Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hal. 18

¹¹ Nurazizah, *Pengendalian Intern Piutang dalam Mengelola Piutang Macet dengan Studinya yang dilakukan di PNPM Mandiri Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara*, Skripsi Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2018.

terms of lending yang telah disepakati dalam pembayaran pembiayaan tersebut, sehingga timbul keterlambatan, yang memungkinkan adanya potensi gagal bayar. Adapun kredit bermasalah juga diartikan sebagai kredit yang tergolong kredit kurang lancar, diragukan, hingga macet. Kredit bermasalah merupakan pengelolaan yang pokok, mengingat bahwa kredit macet (pembiayaan bermasalah) mampu mempengaruhi aset dan kesehatan keuangan.¹²

Sebagaimana diketahui, bahwasannya piutang merupakan salah satu bagian penting dalam harta lancar perusahaan. Keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh salah satu kelompok bisa menyebabkan keterlambatan bergulirnya dana untuk kelompok yang lainnya, sebelum kelompok tersebut melunasi angsuran yang telah disepakati. Dalam hal ini UPK harus mencari strategi penyelesaian dari akibat adanya kemacetan pengembalian pinjaman, agar peminjam memiliki tanggung jawab atas dana yang dipinjamnya. Dengan ini maka apakah dengan menerapkan sistem tanggung renteng dalam pengembalian pinjaman sudah cukup dalam mengendalikan kredit bermasalah, atau bahkan ada faktor lain sebagai faktor pendukung dalam mengendalikan dan meminimalisir risiko kredit bermasalah tersebut.

Beranjak dari uraian latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk membahasnya lebih mendalam, maka dalam penelitian ini penyusun mengambil judul skripsi mengenai “ANALISIS SISTEM *TANGGUNG*

¹²Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hal. 35

RENTENG SEBAGAI STRATEGI DALAM MEMINIMALISIR RISIKO KREDIT BERMASALAH DI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) SENDANG TULUNGAGUNG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem tanggung renteng di Badan Usaha Milik Desa Bersama “Sendang” Tulungagung?
2. Bagaimana sebuah sistem tanggung renteng mampu mejadi strategi dalam meminimalisir risiko kredit bermasalah di Badan Usaha Milik Desa Bersama “Sendang” Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem tanggung renteng ini di terapkan di Badan Usaha Milik Desa Bersama “Sendang” Tulungagung.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem tanggung renteng dalam meminimalisir kredit bermasalah di Badan Usaha Milik Desa Bersama “Sendang” Tulungagung.

D. Pembatasan Masalah

Yang menjadi keterbatasan penelitian kali ini tidak hanya meliputi terbatasnya waktu, dana, dan tenaga yang digunakan untuk melakukan penelitian. Tetapi juga meliputi terbatasnya variabel makroekonomi yang menjadi indikator yang mempengaruhi penggunaan sistem tanggung renteng di Badan Usaha Milik Desa Bersama “Sendang” Tulungagung. Sehingga dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada Penerapan Sistem Tanggung Renteng terhadap Upaya Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis: penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk pengembangan ilmu guna menganalisis sistem tanggung renteng.
2. Secara Praktis:
 - a. Bagi Lembaga : sebagai sumbangsih pemikiran untuk pengambilan kebijakan dalam menangani masalah kredit bermasalah.
 - b. Bagi Akademik : penelitian ini dapat dijadikan dokumentasi akademik yang bertujuan untuk menambah pengetahuan civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
 - c. Bagi Peneliti Lain : hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk penelitian berikutnya, terutama untuk bahan acuan penelitian yang sejenis.

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Tanggung Renteng

Tanggung renteng merupakan pemerataan tanggung jawab bagi seluruh anggota kelompok tanpa terkecuali atas tidak terpenuhinya atau lalainya pemenuhan kewajiban seseorang atau beberapa orang anggota dalam suatu kelompok tersebut. Adapun benang merah yang terkandung dalam sistem tanggung renteng yaitu tanggung jawab bersama atas risiko hutang atau kewajiban seseorang atau beberapa orang anggota.

b. Strategi

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Pengertian strategi menurut A. Halim, strategi merupakan suatu cara dimana sebuah lembaga atau organisasi akan mencapai tujuannya sesuai dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta kemampuan internal dan sumber daya.¹³

c. Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah sebuah kondisi dimana nasabah tidak dapat melunasi angsuran kredit dan bunga yang telah jatuh tempo. Maka hal yang harus dilakukan adalah melakukan proses penyelamatan kredit tersebut agar tidak menjadi macet.¹⁴ Kredit

¹³ Dian Masita Dewi dan Anis Wahdi, *Bisnis dan Perencanaan Bisnis Baru*, Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal. 80

¹⁴ Siti Aisyah, dkk, *Manajemen Keuangan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis), hal. 64

bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.¹⁵

2. Definisi Operasional

a. Tanggung Renteng

Pengertian lain yang juga terkandung dalam sistem tanggung renteng ini yaitu mencakup kesempatan sebuah kelompok dalam memperoleh keanggotaan secara selektif dan mendidik, sehingga dapat menciptakan suatu mekanisme seleksi bagi calon anggota sebuah kelompok secara efektif serta otomatis. Disamping itu, diharapkan dapat menciptakan sebuah mekanisme kontrol yang mampu berjalan secara efektif, sehingga mampu meminimalisir risiko piutang.¹⁶

b. Strategi

Strategi adalah rencana lengkap untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi yang efektif berkaitan dengan tiga persoalan diantaranya yaitu kompetensi, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya.¹⁷

c. Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah (*nonperforming loan*) merupakan kredit yang masuk dalam kategori kredit kurang lancar, kredit macet dan kredit diragukan. Berdasarkan dengan penjelasan tersebut diatas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwasannya kredit macet adalah

¹⁵ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapudan....*, hal. 52

¹⁶ Sukwiati, dkk. *Ekonomi 3*. (Surabaya: Yudhistira, 2006), hal. 62

¹⁷ Ricky W. Griffin, *Manajemen Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hal. 249

bagian dari kredit bermasalah. Tingkat kesehatan atau kestabilan dari sebuah lembaga keuangan.¹⁸

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan adalah penjelasan singkat yang akan menguraikan tentang hal-hal yang akan dilaporkan secara sistematis. Dimana yang menjadi tujuannya adalah untuk mempermudah dalam memperoleh suatu gambaran menyeluruh mengenai penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini, sistematika penulisannya disusun dalam beberapa bab, yang terdiri dari:

1. Bab I, Pendahuluan

Pada bab pertama ini berisikan beberapa uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah (definisi istilah), dan sistematika penulisan skripsi.

2. Bab II, Kajian Pustaka

Pada bab kedua memuat uraian mengenai tinjauan pustaka atau buku yang berisikan teori-teori yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, baik dari teori-teori para tokoh besar dan teori hasil dari penelitian terdahulu. Adapun bab ini terdiri dari kajian fokus, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir teoritis maupun paradigmatik jika diperlukan.

¹⁸ R. Serfianto, dkk. *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, dan Uang Elektronik*, (Jakarta: Visimedia, 2012), hal. 248

3. Bab III, Metode Penelitian

Didalam bab ketiga ini, antara lain berisikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan penelitian, dan tahap-tahap penelitian.

4. Bab IV, Hasil Penelitian

Pada bab keempat yaitu hasil penelitian berisikan uraian mengenai paparan data dan temuan penelitian. Didalam paparan data tersebut akan dipaparkan data yang disajikan sesuai dengan topik, rumusan masalah, dan hasil analisis data atas penelitian yang dilakukan. Yang mana paparan data ini adalah hasil dari wawancara, serta pengamatan waktu dilapangan.

5. Bab V, Pembahasan

Dalam pembahasan ini berisikan mengenai analisis yang dilakukan dengan melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan yang didapat saat penelitian dengan teori serta penelitian yang ada.

6. Bab VI, Penutup

Adapun yang termasuk dalam bab keenam ini hanya terdiri dari dua sub, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk melengkapi keenam bab yang telah disebutkan diatas, maka dalam bagian akhir dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian ini. Lampiran tersebut antara lain berisikan surat-surat ijin dan pengesahan penelitian, daftar gambar, serta daftar riwayat hi